

Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone

Andi Reza Zulkarnain, Rahmatullah, Ashar Prawitno
Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin
Email: zulkarnain1560@gmail.com, rahmatullah.jafar@yahoo.com,
asharprawitno@unhas.ac.id

Abstract

In Bone Regency, the ability of villages to report data on out-of-school children into the data collection system remains a significant challenge. The collaborative issues that emerged among stakeholders in the implementation of the Gemar Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng) Program in Bone Regency indicate inefficiencies and ineffectiveness in coordination and communication. This study aims to analyze the collaborative governance involving the Regional Development Planning Agency (Bappeda), the Department of Education, the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Community Learning Activity Centers (PKBM), and Women's Empowerment Organizations. The analysis focuses on face-to-face dialogue, commitment to the process, and the outcomes achieved through the implementation of the program in Bone Regency. This study employed a qualitative descriptive research method to provide an objective description and explanation of the actual roles of the Regional Development Planning Agency, the Department of Education, the Department of Women's Empowerment and Child Protection, Community Learning Activity Centers, and Women's Empowerment Organizations in fulfilling children's right to education and addressing the issue of out-of-school children through the Gemar Limas Program. The results of the study indicate that face-to-face dialogue led by the Regional Development Planning Agency plays a crucial role in ensuring that each institution performs its responsibilities in accordance with the Regional Action Plan (RAD) and establishes specific targets during coordination meetings. Commitment to the process demonstrated by each institution is based on the principle of "No One Left Behind," ensuring that children's participation is continuously supported throughout the program implementation. The outcomes achieved show that more than 39,000 children were involved in the program between 2017 and 2023. The program also received recognition as one of the Top 99 Public Service Innovation (KIPP) nominees for its innovative contribution and has been adopted at both provincial and national levels.

Keywords: Gemar Limas; Collaborative Governance; Out-of-School Children.

Abstrak

Di Kabupaten Bone, akses desa untuk melaporkan data anak tidak sekolah ke sistem pendataan masih menjadi tantangan besar. Permasalahan kolaborasi yang terjadi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng di Kabupaten Bone menunjukkan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam koordinasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang ditinjau dari Dialog tatap muka, Komitmen terhadap proses, dan Hasil akhir yang dicapai dari pelaksanaan program di Kabupaten Bone. Metode Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dalam pemenuhan hak pendidikan dan penanganan anak tidak sekolah melalui program Gemar Limas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa

Dialog tatap muka yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat vital dalam memastikan setiap instansi terlibat menjalankan peran sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan menetapkan target-target pada saat pertemuan koordinasi. Komitmen terhadap proses yang dilakukan oleh tiap instansi menggunakan pendekatan yang berdasar pada prinsip No one left behind sehingga partisipasi anak selama program berlangsung terus didukung. Hasil akhir yang dicapai menunjukkan keterlibatan lebih dari 39.000 anak dari tahun 2017-2023, meraih nominasi Inovasi KIPP top 99 atas kontribusinya yang inovatif, dan program Gemar Limas diadopsi ditingkat provinsi dan nasional..

Kata kunci: *Gemar Limas, Collaborative Governance, Anak tidak sekolah*

PENDAHULUAN

Dalam perjuangan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, perinciannya dijabarkan dengan tegas dalam Pasal 28C ayat (1) bersamaan dengan Pasal 31 ayat (1) dan (4) dari Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan tersebut secara esensial menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak fundamental atas pendidikan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi guna meningkatkan potensi diri dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam konteks ini, negara melalui undang-undang memberikan jaminan konkret bahwa setiap warga negara memiliki hak yang tidak dapat diabaikan untuk memperoleh pendidikan, dan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai hal tersebut tercermin dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Implikasinya, pemerintah memiliki kewajiban yang mendalam untuk merancang dan melaksanakan sistem pendidikan nasional yang bersifat demokratis, berprinsip keadilan, dan bebas dari diskriminasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur bidang pendidikan.

Selanjutnya, dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 mengenai Wajib Belajar, ditegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan kewajiban bagi warga

negara berusia 7-15 tahun. Penegasan ini sejalan dengan konsep penerapan wajib belajar, yang dinyatakan setara dengan jalur pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan wajib diimplementasikan melalui berbagai jalur ini, mencerminkan pendekatan yang holistik dalam memberikan akses dan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara dalam rentang usia yang ditetapkan dan dalam kondisi apapun termasuk bagi anak tidak sekolah.

Data KPPPA dan BPS 2020 menunjukkan angka putus sekolah yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Tingkat putus sekolah pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan di semua jenjang pendidikan. Tingkat putus sekolah di SMA mencapai 1,38%, di SMP 1,06%, dan di SD 0,13%. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam menjaga kontinuitas pendidikan di berbagai tingkatan. Di Sulawesi Selatan, data BPS tahun 2020 menunjukkan 163.940 anak usia 7-18 tahun tidak bersekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk kurangnya minat melanjutkan pendidikan, sulitnya akses pendidikan, serta masalah ekonomi. Di Kabupaten Bone, lebih dari 52 ribu anak berusia 7-24 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka pada tahun 2019. Dengan memperhatikan data BPS Kabupaten Bone tahun 2019, peringkat IPM yang rendah membutuhkan upaya serius untuk meningkatkan IPM melalui pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah.

Untuk menanggapi isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone menginisiasi program Gerakan Lisu Massikola Paimeng, atau Gemar Limas, yang bertujuan untuk

meningkatkan pemenuhan hak pendidikan. Gerakan Masyarakat Lisu Massikola di Kabupaten Bone yang dimulai pada tahun 2017 bertujuan untuk menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) dan mengembalikan mereka ke lingkungan pendidikan. Namun, hasil program ini belum menunjukkan dampak yang signifikan. Faktor-faktor utama yang menghambat termasuk ketidakjelasan kepemimpinan dalam pelaksanaan program dan miskomunikasi antara pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan desa.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Collaborative Governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) untuk menganalisis masalah ini lebih mendalam. Pendekatan ini mengevaluasi interaksi antar pemangku kepentingan dan mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam kolaborasi. Tiga indikator utama dalam teori ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dialog tatap muka dalam perencanaan penting untuk membangun pemahaman bersama dan tujuan yang disepakati. Komitmen terhadap proses diuji dalam tahap pelaksanaan, sementara evaluasi menilai seluruh proses kolaborasi untuk mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam metode penelitian adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif juga cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan

perspektif subyek. Metode penelitian kualitatif difokuskan pada menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Penelitian ini telah dilakukan mulai dari tanggal 27 Mei hingga 15 Juli 2024 (Terhitung 1 Bulan 17 Hari) di berbagai tempat karena subjek yang diteliti bersifat kolaboratif sehingga melibatkan beberapa lembaga terkait. Adapun instansi yang menjadi tempat penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (BAPPEDA), Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DISDIK Bone), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mawar, PKBM Gema, dan PKBM Mallimongeng.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Penulis melengkapi data penelitian yang berdasar pada data sekunder dan data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan pada analisis *Collaborative Governance* Pemerintah Kabupaten Bone pada program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone dengan menggunakan teori Indikator *Collaborative*

Governance menurut Ansell dan Gash (2007:228) sebagai berikut : Dialog Tatap Muka, Komitmen Terhadap Proses, dan Hasil Akhir yang Dicapai.

Dialog tatap muka

Tahap ini sangat krusial dalam proses kolaborasi karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk berinteraksi langsung, berbagi pandangan, dan mendiskusikan harapan mereka secara terbuka. Melalui dialog ini, kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen dapat dibangun, yang semuanya penting untuk keberhasilan kolaborasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Bupati Bone Nomor 560 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Bone tahun 2020-2023. Keputusan ini menetapkan BAPPEDA Bone sebagai project leader, yang bertanggung jawab atas koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Peran BAPPEDA sebagai pemimpin proyek menegaskan pentingnya pendekatan yang terorganisir dan terkoordinasi dalam menangani isu anak tidak sekolah di Kabupaten Bone. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berperan sebagai koordinator utama atau *leading sector* dalam memastikan setiap instansi terlibat menjalankan perannya sesuai dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang telah disepakati.

Sebagai awal perencanaan, BAPPEDA bersama Sekretariat Daerah melakukan dialog tatap muka dan pertemuan koordinasi untuk membahas mengenai program Gemar Limas secara komprehensif dan untuk menyatukan pandangan disetiap mitra yang terlibat. Pada awal *launching*, BAPPEDA mengundang PKBM yang akan menjadi *pilot project* program Gemar Limas di sekolahnya untuk memberikan pengarah dan peresmian awal yang menandakan bahwa program diluncurkan oleh pemerintah. Sekretariat

Daerah berperan penting dalam memfasilitasi rapat koordinasi yang diadakan di BAPPEDA Kabupaten Bone, dengan mengundang mitra terkait untuk membahas peranan dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas). Inisiatif ini mencerminkan upaya kolaboratif dan integratif dalam pengelolaan program yang kompleks, di mana partisipasi berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal.

Dinas Pendidikan berfokus pada aspek pembelajaran, baik formal maupun non-formal, mengarahkan anak yang kembali ke sekolah formal atau ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Di bawah naungan Dinas Pendidikan, PKBM berfungsi sebagai platform media belajar bagi ATS. Mereka mendata anak-anak di setiap kelurahan dan bekerja sama dengan kader desa serta penilik kesetaraan dari Disdik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 yang mengatur tentang pendidikan nonformal, termasuk PKBM. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Dalam perspektif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), mereka mengadvokasikan dan berupaya memastikan anak-anak yang putus sekolah mendapatkan perhatian yang diperlukan. Selain pemerintah, salah satu mitra lembaga swadaya masyarakat dalam program Gemar Limas adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone didukung oleh UNICEF Indonesia yang berperan dalam advokasi dan pendataan. UNICEF memberikan dana hibah kepada LPP Bone untuk membantu gerakan percepatan anak tidak sekolah sebagai salah satu Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah dan mewujudkan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan pada poin pendidikan berkualitas dengan melatih tutor PKBM terkait pembelajaran yang digunakan dalam program dengan menggunakan modul pemberdayaan yang telah disusun oleh Tim UNICEF. Dengan dukungan itu, LPP membantu mengadvokasikan pemanggaran yang responsif terhadap anak, melakukan pendataan di desa dengan melakukan pelatihan, dan merekonfirmasi data untuk memastikan anak-anak kembali ke sekolah.

Komitmen Terhadap Proses

Pada indikator ini, mencerminkan kesediaan dan kesiapan para pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam waktu, sumber daya, dan energi untuk mencapai tujuan bersama melalui negosiasi dan kerja sama. Dalam konteks *collaborative governance*, komitmen terhadap proses sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Program Gemar Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng) di Kabupaten Bone dapat mencapai tujuan bersama, yaitu menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak melalui pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai instansi yang terlibat, komitmen terhadap proses ini tercermin dalam beberapa aspek kunci yang dijelaskan berikut ini.

Pemerintah Kabupaten Bone melakukan berbagai komitmen dalam mengimplementasikan program Gemar Limas, salah satu langkah konkretnya adalah mengeluarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 430 Tahun 2020 Tentang Pengembalian Anak dan Remaja Bersekolah melalui Program Gerakan Kembali Bersekolah tahun Pelajaran 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.

Dengan adanya kekuatan legalitas yang dikeluarkan oleh Bupati Bone ini semakin meyakinkan bahwa komitmen pemerintah daerah dan seluruh mitra terlibat terus berupaya meningkatkan hak pendidikan anak dan remaja. Hal ini bisa membawa dampak

yang lebih baik untuk perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan angka partisipasi edukasi dalam kehidupan masyarakat. Seiring berjalan, Tahun ini, Bappeda mengalami pergeseran peran yang awalnya menjadi project lead ke peran pendukung yang lebih fokus pada optimalisasi penggunaan data dan sumber daya desa.

Kepemimpinan program Gemar Limas dialihkan ke Dinas Pendidikan yang lebih sesuai dengan Tupoksi instansinya. Bappeda menekankan pentingnya optimalisasi identifikasi ATS di desa dengan memberdayakan operator penginput data di Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Komitmen Dinas Pendidikan terlihat jelas dengan menyerahkan tanggung jawab kepada bidang subprogram terkait dan memastikan adanya alokasi dana untuk Anak Tidak Sekolah (ATS). Dinas Pendidikan juga aktif melibatkan pendidik, pemimpin desa, dan ketua Pusat Kegiatan Belajar (PAKB), serta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk pendataan ATS.

Lebih lanjut, PKBM (Mawar, Gema, dan Mallimongeng) sebagai mitra pemerintah dan sekolah paket yang menunjukkan komitmen terhadap proses melalui pelatihan tutor untuk mengikuti pelatihan oleh LPP Bone dan UNICEF menggunakan modul Kit Remaja yang telah diadopsi menjadi kurikulum keterampilan di PKBM.

Gambar 1. Pelatihan Modul Lingkar Remaja



Sumber: Lembaga Pemberdayaan Perempuan Bone

Gambar diatas merupakan proses pengembangan kapasitas tutor PKBM dan fasilitator lingkaran remaja yang diselenggarakan oleh LPP Bone dan UNICEF. Peserta pelatihan tersebut diberikan ilmu mengenai penggunaan modul sebagai bahan ajar yang menyenangkan di PKBM yang mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Sedangkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menegaskan komitmen dan konsistensi mereka dalam penguatan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Lebih lanjut, dari sisi Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone mereka memperjuangkan pendidikan anak-anak hingga tingkat kuliah, mengembangkan lingkaran remaja menggunakan modul kit remaja bersama PKBM, dan meningkatkan keterampilan melalui labskill yang mendukung anak-anak untuk berusaha meningkatkan ekonomi mereka. Monitoring dengan rapid pro melibatkan sekolah dan desa untuk mengetahui kehadiran anak-anak dan mendekati mereka yang rentan berhenti sekolah kembali.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik PKBM di Kab. Bone Tahun Ajaran 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1.	Ajangale	210
2.	Awangpone	290
3.	Barebbo	447
4.	Bontocani	117
5.	Lamuru	334
6.	Lappariaja	451
7.	Libureng	80
8..	Mare	152
9.	Patimpeng	430
10.	Ponre	30
11.	Salomekko	89
12.	Sibulue	244
13.	Tanete Riattang	1225

14.	Tanete Riattang Timur	1021
15.	Tellusiattinge	1592
16.	Tonra	140
17.	Ulaweng	800
TOTAL		7682

Sumber : Data Pokok Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dalam basis data pada tabel diatas mengilustrasikan distribusi jumlah peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai kecamatan di Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2023-2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah peserta didik di setiap kecamatan. Kecamatan dengan jumlah peserta didik tertinggi adalah Tellusiattinge, yang mencatatkan 1592 peserta didik. Angka ini menunjukkan kebutuhan dan minat yang tinggi terhadap program PKBM di wilayah tersebut. Menyusul di posisi kedua adalah Kecamatan Tanete Riattang dengan 1225 peserta didik. Di posisi ketiga, Kecamatan Tanete Riattang Timur melaporkan 1021 peserta didik. Sebaliknya, Kecamatan Ponre memiliki jumlah peserta didik terendah dengan hanya 30 peserta didik.

PKBM Gema, Mawar, Mallimongeng, dan Cumpiga menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mengembalikan anak-anak putus sekolah ke jalur pendidikan, dengan fokus pada pengembangan soft skill dan dukungan langsung kepada masyarakat. Dukungan dari Dana Desa turut memperkuat upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.

Gambar 2. Anggaran Pelaksanaan Gemar Limas di Cumpiga

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA CUMPIGA KECAMATAN AWANGPONE				
TAHUN ANGGARAN 2021				
Bidang	: 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang	: 2.1. Sub Bidang Pendidikan			
Kegiatan	: 2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan			
Output/Keluaran	: Terbayarnya Uang Saku Peserta didik			
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	BELANJA			7.100.000,00
2.01.10	01 Gerakan Masyarakat Lisu Massikola (GEMAR LIMAS)			7.100.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.100.000,00
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			7.100.000,00
	01. Uang Saku Untuk di Tingkat SD/ Sederajat 6 Orng DDS	6 Orng	300.000,00	1.800.000,00
	02. Uang Saku Untuk di Tingkat SMP/Sederajat 5 Orang DDS	5 Orng	500.000,00	2.500.000,00
	03. Uang Saku untuk Ditingkat SMA/Sederajat 4 Orang DDS	4 Orang	700.000,00	2.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			7.100.000,00

Sumber : Pemerintah Desa Cumpiga 2021

Gambar diatas menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mengimpleemntasikan program Gemar Limas dengan mengalokasikan anggaran desa mereka secara spesifik ke program Gemar Limas. PKBM aktif melakukan pendekatan kepada orang tua dan langsung kepada anak-anak untuk membawa mereka kembali ke dunia pendidikan. Pendekatan yang dilakukan oleh PKBM meliputi pendataan terhadap anak-anak yang putus sekolah dan pertemuan dengan mereka untuk menentukan jalur pendidikan yang tepat, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang disediakan oleh PKBM.

Hasil akhir yang dicapai

Indikator Hasil Akhir yang Dicapai dalam *collaborative governance* menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari *output* yang dihasilkan, tetapi juga dari perubahan yang berhasil dicapai dalam jangka panjang. Kepuasan pemangku kepentingan serta kemampuan untuk

melaksanakan keputusan yang dihasilkan juga menjadi penanda keberhasilan.

Bappeda Kabupaten Bone telah berhasil mengembalikan kurang lebih 39.000 anak setelah 6 tahun implemetasi program rentan tahun dari 2017-2023, kemudian memperoleh nominasi Inovasi KIPP top 99 atas kontribusinya dalam Gemar Limas. Hal ini menunjukkan pengakuan atas keberhasilan program dalam menciptakan inovasi yang dapat diadopsi dan diimplementasikan di tingkat nasional. Program Gemar Limas di Kabupaten Bone telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendekatan *collaborative governance*.

Gambar 3. Capaian Program Gemar Limas Sebelum dan Setelah Inovasi

capaian sebelum dan setelah inovasi						
NO	URAIAN	Sebelum Inovasi (orang)	Setelah Inovasi			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7-18 tahun	54.000	52.976	51.952	50.254	49.214
2	Kasus Perkawinan Anak	4.642	3.750	2.840	2.649	2.097
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	84,37	84,56	85,12	100,27	101,98
4	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK	70,59	71,32	82,08	91,54	94,02
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	63,86	64,16	65,04	65,67	66,06
6	Rata-rata lama Sekolah (RLS)	6,76	6,77	6,97	6,98	7,15
7	Angka melek Huruf (AMH)	87,87	87,88	89,98	91,09	93,25

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Bone 2021

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone mencatat bahwa dari tahun 2017 hingga 2020, lebih dari 52 ribu anak dan remaja berusia 7-24 tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka. Dalam rincian usia, terdapat 1.609 anak dalam kelompok usia 7-12 tahun, 4.211 anak dalam kelompok usia 13-15 tahun, dan 10.650 anak dalam kelompok usia 16-17 tahun. Di tahun 2023, kabupaten bone berhasil menekan angka tersebut dari 52.976 menjadi 13. 850. Perubahan ini juga didukung atas partisipasi PKBM di Kabupaten Bone yang memainkan peran penting dalam implementasi Gemar Limas dengan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan seperti *learning by doing* dan *playing*. Pembaharuan dan dampak yang dihasilkan oleh program Gemar

Limas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone, yang meningkat dari 66,2 pada tahun 2020 menjadi 67,5 pada tahun 2022. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh sektor pendidikan, yang menunjukkan bahwa program Gemar Limas berhasil dalam aspek peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone memberikan kontribusi signifikan dalam mengembalikan anak-anak yang tidak bersekolah ke jalur pendidikan melalui program Gemar Limas. DP3A fokus pada peningkatan keterampilan soft skill dan hard skill, yang tidak hanya membantu dalam proses reintegrasi anak-anak ke sekolah tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Dengan pendekatan yang komprehensif, DP3A tidak hanya memastikan bahwa anak-anak kembali ke sekolah, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan.

Gambar 4. Capaian Indikator tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Demokrasi	%	-	-	-	-	-
2	Anak Tidak Sekolah (ATS)	Anak	52.976	45.354	8.999	17.778	13.850
3	Inflasi	%	1,64	1,89	2,26	5,52	2,84
4	PDRB (ADHB)	Juta Rupiah	36.034.839,17	36.560.640,40	39.369.680,42	43.640.844,00	46.935.170,81
5	PDRB Per Kapita	Juta/Kapita/Tahun	47,81	45,68	48,67	53,48	57,02
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,01	-0,25	5,53	5,23	3,77
7	Tingkat Kemiskinan	%	10,06	10,68	10,52	10,58	10,53
8	Indeks Gini Rasio	Poin	0,366	0,404	0,383	0,376	0,389
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,01	3,20	4,15	2,27	2,88
10	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65,67	66,06	66,40	67,01	73,20
11	Prevalensi Stunting	%	40,1	37,0	34,1	27,8	26,0
12	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	36,72/ C	43,72/ C	56,77/ CC	59,54/ CC	56,92/ CC
13	Nilai SAKIP	Poin	60,03/ B	63,42/ B	66,04/ B	67,35/ B	B
14	Indeks SPBE	Poin	-	-	-	-	-

Sumber : BAPPEDA Kab. Bone tahun 2023

Secara keseluruhan, program Gemar Limas di Kabupaten Bone telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendekatan *collaborative governance*. Melalui kolaborasi yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Bone, PKBM, DP3A, LPP, dan masyarakat luas, program ini berhasil mengembalikan lebih dari 39.000 anak ke jalur pendidikan dalam rentang waktu enam tahun.

Keberhasilan program ini tidak hanya terlihat dari peningkatan akses pendidikan formal dan non-formal, tetapi juga dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan. Partisipasi aktif anak-anak dalam program ini menunjukkan bahwa mereka kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka, baik dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sosial ekonomi.

Program Gemar Limas diakui secara nasional melalui nominasi Inovasi KIPP top 99, menegaskan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat diadopsi dan diimplementasikan di tingkat nasional. Penghargaan yang diterima oleh Bupati Bone atas komitmennya dalam meningkatkan IPM, serta pengakuan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat telah membuktikan bahwa program ini memiliki potensi besar untuk terus memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Bone melalui pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti resistensi dari beberapa desa terhadap program ini dan kesulitan dalam memastikan kualitas dan konsistensi dalam implementasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam Program Gerakan Masyarakat Lisu Massikola Paimeng (Gemar Limas) di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (DP3A), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP), pemerintah desa, serta dukungan UNICEF Indonesia. Kolaborasi tersebut dilaksanakan melalui dialog tatap muka yang intensif, komitmen yang kuat terhadap proses, dan pencapaian hasil yang signifikan dalam penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Bone.

Pada aspek dialog tatap muka, Bappeda Kabupaten Bone berperan sebagai leading sector yang mengoordinasikan seluruh pihak terkait melalui forum koordinasi dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), sehingga tercipta kesamaan persepsi dan pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan program. Sementara itu, komitmen terhadap proses ditunjukkan melalui dukungan regulasi pemerintah daerah, alokasi sumber daya, penguatan kapasitas tutor PKBM, pendataan anak tidak sekolah secara berkelanjutan, serta penerapan prinsip No One Left Behind dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak.

Hasil akhir yang dicapai menunjukkan bahwa Program Gemar Limas berhasil memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Bone. Program ini berhasil mengembalikan lebih dari 39.000 anak ke jalur pendidikan, menurunkan jumlah anak tidak sekolah secara signifikan, meningkatkan partisipasi pendidikan melalui PKBM, serta berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bone. Keberhasilan tersebut juga mendapatkan pengakuan nasional melalui nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), yang menunjukkan bahwa model kolaborasi dalam Program Gemar Limas dapat menjadi contoh praktik baik dalam penanganan anak tidak sekolah di tingkat daerah maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman (2024). Peran PKBM dalam Meningkatkan Pendidikan di Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus pada PKBM Hidayah). *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 12(1), 395-405. <https://journalstkipgrisitubondo.ac.id/index.php/PKWU/index>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. https://www.researchgate.net/publication/31311629_Collaborative_Governance_in_Theory
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (BAPPEDA) <https://bappeda.bone.go.id>
- Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. <https://dapo.kemdikbud.go.id/>
- Dinas Pendidikan Kabupaten Bone (DISDIK Bone) <https://disdik.bone.go.id>
file:///Users/macbookair/Downloads/<https://disdik.bone.go.id/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>
- Hakim, F. N. (2021). Optimalisasi Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Dalam Menurunkan Angka Putus Sekolah di Kelurahan Kopo, 1(68), 25-28. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/1282>

- Kemendikbudristek. (2024). Dataset Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Tingkat Tiap Provinsi, Wilayah Indonesia, Jenjang SD, Tahun Ajaran 2023/2024. <https://data.kemdikbud.go.id>
- Lee, C., & Kim, S. (2021). Kemitraan publik-swasta dan keterlibatan NGO dalam pengembangan perkotaan: Pelajaran dari inisiatif terbaru. *Urban Studies*, 58(6), 1245-1261. <https://journals.sagepub.com/home/usj>
- Maghfirah, I. (2021). PKBM as an Alternative to Inclusive Education for the Community. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/spektrum/article/view/1211>
- Meyer, R., & Howlett, M. (2024). "Memahami Tata Kelola Kolaboratif melalui Inovasi Kebijakan: Pelajaran dari Studi Kasus Terbaru. *Jurnal Studi Kebijakan*, 52(3), 758-782. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psj.12451>
- Noviani, L., Budiarti, A. C., Tuhana, T., & Setyawati, M. (2023). Strategi penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Sragen. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 7(1), 92-103. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.379>
- Nurhuda, H. (2022). Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Dirasah*, 128(135). <https://stai-binamadani-ejournal.id/jurdir/article/view/406>
- Paikah, N. (2022). Implementasi Program Gemar Limas (Gerakan Masyarakat Lisu Massikola) di Kabupaten Bone. Yayasan Cendekiawan Indonesia Timur. <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/126/1/Arsip%20Program%20Gemarlimas.pdf>
- Puan Renna, H. R. (2022). Konsep Pendidikan Menurut John Locke dan Relevansinya bagi Pendidikan Sekolah Dasar di Wilayah Pedalaman Papua. *Jurnal Papeda*, 4(1), 8-12. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31880/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- Smith, J., & Jones, A. (2022). Governansi kolaboratif dan inovasi sektor publik: Peran jaringan dalam mengubah hasil kebijakan. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(1), 58-73. <https://academic.oup.com/jpart/article/32/1/58/5936120>
- Susiana, A. (2023). Empowerment of Poor Communities Through Information Technology Based Entrepreneurship Training at Nagari Aia Manggih Utara Youth Center, Lubuk Sikaping District, Pasaman Regency. *KOLOKIUM Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 11(23). <http://kolokium.ppj.unp.ac.id/index.php/kolokium-pls/article/view/485>
- Syaadah, R. (2022). Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal. *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 125-131. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema>

UNICEF Indonesia. (2021). Pendidikan dan Remaja.

<https://www.unicef.org/indonesia/id/education-and-adolescents>

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). (2022). Dampak Pandemi, Mayoritas Anak Indonesia Putus Sekolah Karena Ekonomi.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/15/dampak-pandemi-mayoritas-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ekonomi>

Velby, A. C. (2023). Meta-analitik Collaborative Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian dan Pembangunan Pendidikan*, 8(1), 19-41. DOI: <https://doi.org/10.33701/j-3p.v8i1.3455>

Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan*, 7(1), 2896-2910

Wijaya, T., & Nasution, M. (2023). Dampak governansi kolaboratif terhadap pemberdayaan komunitas. *International Journal of Public Administration*, 46(4), 312-328.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01900692.2022.2093032>